

ANALISIS POLA PERILAKU KEPALA DESA DALAM MEMBUAT ANGGARAN OBJEK WISATA DESA: ANTARA TEKANAN PIHAK LUAR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Evi Malia¹, Aminullah², Hanafi³

Universitas Islam Madura

Email: evi.malia@uim.ac.id

aminullah@uim.ac.id

afiliasihanafi@gmail.com

Abstrak:

Sejak pemerintah mengucurkan dana desa, semua desa di Indonesia berlomba-lomba membuat objek wisata untuk keterserapan anggaran dan peningkatan pendapatan asli desa dikarenakan dana desa harus digunakan untuk program pembangunan berkelanjutan, pembentukan objek wisata di desa merupakan hal paling terjangkau yang bisa dilakukan oleh kepala desa. Keputusan untuk menganggarkan objek wisata melalui dana desa oleh kepala desa tidaklah mudah, terdapat factor luar yang mempengaruhinya, bisa karena janji politiknya ataupun factor keterpaksaan karena aturan, mengingat prioritas penggunaan dana desa harus memenuhi kriteria pembangunan yang berkelanjutan (SDG's Desa). Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku kepala desa dalam menganggarkan dana desanya untuk objek wisata.

Kata Kunci: *Perilaku, objek wisata*

Abstract:

This is a new author guidelines and article template of Kabilah (Journal of Social Community). Article should be started by Title of Article followed by Authors Name and Affiliation Address and abstract. This abstract section should be typed in *Book Antiqua* and *font size of 11 pt* and number of words around of 150-200. Special for the abstract section, please use left margin of 35 mm, top margin of 35 mm, right and bottom margins of 35 mm. The single spacing should be used between lines in this article. If article is written in Indonesian, the abstract should be typed in English and Indonesian. Meanwhile, if article is written in English, the abstract should be typed in English only. The abstract should be typed as concise as possible and should be composed of: problem statement, method, scientific finding results, and short conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and one-column format.

Keywords: *Behavior, attractions*

Pendahuluan

Sejak tahun 2015 dengan adanya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah, semua desa di Indonesia berbondong-bondong untuk menggali potensi desanya salah satunya yaitu melalui pembentukan desa wisata. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Dana Desa wajib digunakan untuk program berkelanjutan di desa dengan fokus pada Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)¹. Dana tersebut memiliki tiga fokus anggaran, mencakup pembangunan infrastruktur,

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Manfaat dana desa melibatkan peningkatan kemandirian, pemberdayaan, dan kesejahteraan desa. Program SDGs Desa menjadi bagian dari prioritas penggunaan dana desa, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam percepatan pencapaian SDGs, dana desa diarahkan untuk memajukan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan.

Desa wisata berperan penting dalam mendukung SDGs (*Sustainable Development Goals*) desa. Strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan menjadi kunci implementasi, terutama untuk pemulihan sektor pariwisata pascapandemi secara berkesinambungan² (Sudibya, 1970). Desa wisata, sebagai konsep pariwisata berkelanjutan, berbasis pemberdayaan masyarakat, dapat mencapai 18 Goals KEMENDES dan menciptakan destinasi wisata berbasis *sustainable tourism* (<https://disbudparpora.ponorogo.go.id/>)

Madura sebagai destinasi wisata yang potensial menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana desa menjadi daya tarik wisata dimulai saat kepala desa menganggarkan dana desa untuk objek wisata. Kepala Desa sebagai pemegang kebijakan perlu mempertimbangkan aspek moral dan psikologis dalam mengelola anggaran. Hal ini penting untuk mencegah kecurangan dan meningkatkan transparansi keuangan desa, bukan hanya sekedar menganggarkan kemudian implementasi seadanya yang penting anggaran tersebut telah dilaksanakan.

Kepala desa dapat menghadapi beberapa masalah saat menganggarkan dana desa untuk objek wisata yaitu yang pertama kurangnya akuntabilitas, pengelolaan dana desa rentan terjadi korupsi karena kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa³ (Zakariya, n.d.). yang kedua yaitu penyalahgunaan dana desa, analisis faktor penyebab penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dan modus penyalahgunaan perlu diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan alokasi dana desa⁴ (Safitri, n.d.). Yang ketiga, jika memang desa memiliki potensi wisata, maka hendaknya Alokasi dana desa sebaiknya difokuskan pada pemberdayaan desa wisata untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (<https://berita.pesisirselatankab.go.id/>). upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa untuk objek wisata perlu melibatkan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga keputusan kepala desa menganggarkan dana desa untuk objek wisata desa telah dipertimbangkan dengan matang.

Kepala desa beserta pihak- pihak terkait perlu melakukan kajian mendalam mengenai potensi wisata di daerahnya agar anggaran yang ditetapkan bisa tepat sasaran. Sebagai salah satu contoh terdapat Potensi lahan garam di empat kabupaten di Madura dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengembangkan wisata garam yang menarik melalui konsep pendidikan wisata garam (edutourism) dan dikemas dengan wisata budaya dan sejarah. Desa dapat melakukan kajian mendalam mengenai potensi wisata garam tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Desa Bunder di Pademawu Kabupaten Pamekasan⁵ (Susandini & Islam, 2022), Selain di Desa Bunder, Desa Brukoh juga menerapkan strategi pengembangan desa wisata tertentu, dengan fokus pada keberlanjutan ekologi, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat⁶ (Pramono et al., 2023). Sedangkan di Kabupaten Sampang Pembangunan Kampung Tenggher

² Sudibya B. Wisata Desa dan Desa Wisata. Jurnal Bali Membangun Bali. 1970 Jan 1;1(1):22–6

³ Zakariya R. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi. 6(2):263–82

⁴ Safitri R. ANALISIS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Taman Jaya).

⁵ Susandini A, Islam D. Konsep pengembangan wisata garam Madura dengan analisis SWOT. MBR (Management and Business Review). 2022 Jun 30;6(1):59–68.

⁶ Pramono IB, Oktavianti H, Sutikno S, Ambariyanto A. Strategi Pengembangan Bukit Brukoh Sebagai Desa Wisata Halal Berbasis Ekologi, Edukasi Dan Komunitas Masyarakat Desa. Buletin Ekonomika Pembangunan. 2023 Jan 18;3(2)

sebagai tujuan wisata potensial dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di desa dan mengurangi kemiskinan (Romadhona et al., n.d.). Dengan menerapkan strategi ini, Madura dapat meningkatkan potensi pariwisatanya sekaligus mengelola dana desa secara efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selain moralitas, kondisi psikologis individu kepala desa juga dapat menimbulkan dampak pada keputusan anggaran yang tidak jelas atau berubah-ubah sehingga menyebabkan stres dan ketidakpastian bagi stakeholders di sektor pariwisata, termasuk pengelola objek wisata dan masyarakat lokal (Yudha et al., 2021). Pengelolaan anggaran yang efektif dapat meningkatkan motivasi dalam pengembangan objek wisata, menciptakan atmosfer positif untuk pencapaian tujuan (Yudha et al., 2021). Keputusan pengembangan pariwisata dapat memengaruhi aspek ekonomi dan sosial, baik positif maupun negatif, sehingga perlu pertimbangan hati-hati⁷⁸ (Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Wilayah Bali Selatan, n.d.) (Kartika et al., n.d.). Diperlukan strategi untuk mengurangi dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial, guna mencapai keberlanjutan objek wisata⁹ (Try Yatmaja et al., n.d.). Pengelolaan anggaran yang baik dapat meningkatkan keputusan berkunjung wisatawan, berkontribusi pada keberlanjutan dan keuntungan bisnis pariwisata¹⁰ (Yosandri et al., n.d.).

Serangkaian penelitian telah mengeksplorasi peran moralitas individu dalam konteks kecurangan akuntansi dan alokasi anggaran¹¹. (Anisykurlillah et al., n.d.) Anisykurlillah (2019) menemukan bahwa moralitas individu dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan Rosalina (2020)¹² (Rosalina, 2020) mengidentifikasi adanya hubungan negatif antara moralitas individu dengan kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Hasmawati (2022)¹³ (Hasmawati, 2022) dan Kurniawan (2022)¹⁴ (Kurniawan & Haq, 2022) keduanya mengkonfirmasi dampak signifikan dari moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi, dengan Hasmawati juga menyoroti pengaruh pengendalian internal. Temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa moralitas individu memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, termasuk alokasi dana desa untuk tujuan pariwisata.

Kepala desa memainkan peran penting dalam membuat keputusan anggaran untuk tempat wisata, menyeimbangkan tekanan luar dan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan desa wisata bergantung pada faktor-faktor seperti pengetahuan dan kemampuan pejabat desa, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan penyelarasan pengeluaran dana dengan kebutuhan desa¹⁵ (Sigiro et al., 2022). Kepala desa menyusun

⁷ Analisis dampak perkembangan pariwisata terhadap perilaku konsumtif masyarakat wilayah bali selatan

⁸ Analisis dampak perkembangan pariwisata terhadap perilaku konsumtif masyarakat wilayah bali selatan

⁹ Try Yatmaja P, Minang P, Bahari R, Kelawi D. EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

¹⁰ Yosandri BJ, Eviana N, Usaha P, Wisata P, Pariwisata A, Jakarta I. Peningkatan Keputusan Berkunjung Wisatawan Melalui Pengembangan Citra Destinasi dan Aksesibilitas di Lembah Tepus Bogor Tambahkan. 7(1):2022

¹¹ Anisykurlillah I, Wardianti S, Akuntansi J, Ekonomi F. Analisis Moralitas Individu Dalam Memoderasi Determinan Kecurangan Akuntansi. Analisis Moralitas

¹² Roalina D. PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KESESUAIAN KOMPENSASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN MORALITAS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN DANA DESA DENGAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Universitas Negeri

¹³ Hasmawati. PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (Studi [Kurniawan J, Haq A. PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, INTEGRITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI. Jurnal Ekonomi Trisakti. 2022 Oct 26;2(2):1691–702.

¹⁴ Sigiro EE, Marjuka Y, Yudea R, Alim TE. IDENTIFYING THE VILLAGE FUND'S EFFECTIVENESS IN STRENGTHENING SUSTAINABLE TOURISM VILLAGES. Journal of Event, Tourism and Hospitality Studies. 2022 Dec 23;2:77–105.

¹⁵ Mayasari Soeswoyo D, Swasti Asparini Syahrijati P, Aryo Baskoro D, Aryo Anggoro D, Jayanti Sutisna M, Tinggi Pariwisata Bogor-Indonesia S, et al. Tourism Components Analysis and Sustainable Rural Tourism Development Planning Based on Culture

strategi untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan tempat wisata, memanfaatkan potensi pariwisata desanya untuk mencapai kemerdekaan dan meningkatkan kesejahteraan¹⁶ (Mayasari Soeswoyo et al., 2022). Pengambilan keputusan dalam pengembangan berkelanjutan pariwisata warisan budaya takbenda (ICH) dipengaruhi oleh niat altruistik dan manfaat egoistik¹⁷ (Tityanda Putri et al., n.d.). Kebijakan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, mendorong pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan¹⁸ (Komang Mahayana Putra et al., 2022). Komunikasi kelompok dan proses pengambilan keputusan sangat penting dalam membangun objek pariwisata, melibatkan analisis masalah, penetapan tujuan, identifikasi alternatif, dan evaluasi. Sehingga novelty atau keterbaruan dari penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara moralitas individu kepala desa dan dampak psikologisnya pada keputusannya menganggarkan objek wisata melalui dana desa sehingga kepala desa

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini melibatkan eksplorasi mendalam terhadap suatu kejadian atau fenomena tertentu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Tujuan dari diterapkannya metode ini yaitu untuk Mengidentifikasi pola perilaku kepala desa dalam membuat keputusan anggaran untuk objek wisata, Menganalisis pengaruh tekanan pihak luar dan pembangunan berkelanjutan terhadap pola perilaku kepala desa, dan Merumuskan rekomendasi untuk mendorong pengambilan keputusan anggaran yang berkelanjutan dan adil. Objek penelitian ini yaitu Desa di KABUPATEN Pamekasan yang memiliki objek wisata Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu :

1. Wawancara, wawancara dilakukan menggunakan Teknik wawancara mendalam dengan beberapa informan:
 - a. Pendamping desa, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengawal Undang - undang desa, hal yang ditanyakan yaitu terkait pendampingannya memberikan arahan dan masukan kepada desa mengenai pembentukan desa wisata.
 - b. Kepala desa, yang memiliki wewenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Adapun hal yang ditanyakan terkait proses perumusan anggaran objek wisata beserta tim yang terlibat dalam pelaksanaan program desa wisata tersebut.
 - c. Perangkat desa, yang memiliki tupoksi mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat; • melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan. Adapun hal yang ditanyakan yaitu terkait proses penyusunan anggaran di desa.
2. Observasi, observasi dilakukan menggunakan Observasi partisipatif di desa yang memiliki objek wisata. Data observasi pada penelitian ini akan ditunjukkan melalui foto sebagai data yang dapat divisualisasikan,

and Agriculture in Indonesia (Case Study: Cimande Village). East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) [Internet]. 2022;1(6):1129–46. Available from: <https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/index>

¹⁶ Tityanda Putri C, Wardiyanto B, Suaedi F. Policy evaluation of village fund through an agro-tourism village for sustainable local development Evaluasi kebijakan dana desa melalui desa wisata agro guna menciptakan pembangunan local berkelanjutan.

¹⁷ Komang Mahayana Putra I, Wayan Sumetri N, Wayan Eka Dian Rahmanu I, Gede Putra Yudistira C, Dwi Cahaya Putra K. Tourists Perceptions and Preferences of Sustainable Rural Tourism Management: A Case Study on the Bakas Tourism Area, Banjarangkan Sub District Klungkung Regency, Bali. 2022.

¹⁸ <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/desa-wisata-konsep-pariwisata-berkelanjutan-berbasis-pemberdayaan-masyarakat>

3. Dokumentasi, Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menganalisis dokumen, seperti peraturan desa, anggaran desa, dan laporan kegiatan. Dokumen APBDes penting didapatkan dalam penelitian ini untuk menganalisis besaran anggaran yang telah disepakati oleh Desa dalam menganggarkan objek wisata. Serta tak kalah pentingnya, data awal sebagai sumber informasi penelitian ini yaitu data desa wisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik menurut Miles Huberman dimana ada tiga teknik, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, kegiatan reduksi data merupakan kegiatan merangkum dari hasil pengumpulan data baik melalui wawancara maupun observasi dan dokumentasi.
2. Penyajian data, dalam penyajian data ini, penulis akan menyajikan data berupa jawaban yang diberikan oleh informan dan data yang diperoleh akan disajikan. Sehingga data tersebut terorganisir dan tersusun serta lebih mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, dalam tahap kesimpulan ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang sudah diperoleh. Sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang sesuai dengan penelitian dan sesuai dengan data yang sebenarnya dari lapangan, dan akan membentuk pola perilaku kepala desa dalam membuat keputusan anggaran untuk objek wisata di desanya apakah karena tekanan dari pihak luar atau memang untuk pembangunan yang berkelanjutan. jika karena tuntutan pihak luar.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kabupaten Pamekasan banyak memiliki objek wisata, baik objek wisata yang dikelola Desa, Swasta, maupun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, berikut merupakan daftar objek wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.

No	Objek wisata	Pengelola
1	Api tak kujung padam	Swasta
2.	Pantai jumiang	Disparpora
3.	Pantai talang siring	Disparpora
4.	Pasarean batu ampar	Desa
5.	Makam ronggosukowati	Swasta
6.	Museum mandhilaras	Swasta
7.	Ekowisata mangrove lembung	Disparpora
8.	Kampoeng toron samalem	Swasta
9.	Puncak ratu	Desa
10.	Kampong durian	Desa
11.	Bukit kehi	Desa
12.	Bukit brukoh	Desa
13	Wisata sawah	Desa
14.	Vihara avalokitesvara	Desa
15.	Eduwisata garam	Desa
16	Gagah Dreampark	Desa
Total		

Sumber : Disparapar Kab. Pamekasan

Salah satu desa yang memiliki objek wisata yaitu Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan objek wisata desa yang bernama Kampoeng wisata toron samalem yang sudah berdiri sejak tahun 2017 hingga tahun 2024. Namun, Objek wisata tersebut sudah tidak beroperasi kembali karena terdapat beberapa faktor penyebab salah satunya adalah harga tiket masuk yang terlalu mahal sehingga minat wisatawan untuk berkunjung berkurang. Selain itu, tidak ada dukungan dari tokoh masyarakat setempat, sehingga wisata tersebut hanya beroperasi sekitar 7 tahun. Sedangkan desa

Di Kabupaten Pamekasan, hampir setiap desa memiliki Pondok Pesantren atau memiliki tokoh agama yang disegani masyarakat. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pada tahap perencanaan terdapat musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri para tokoh agama tersebut. Pendapatnya sangat dibutuhkan untuk mendukung program yang ada dalam APBDDes. Pemerintah Desa terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada para tokoh agama tersebut. Desa Blumbungan merupakan salah satu desa yang tidak mendapat dukungan dari tokoh agama untuk keberadaan objek wisata karena dianggap hanya akan memberikan dampak mudharat kepada masyarakat. sehingga Desa Blumbungan tidak mengalokasikan Dana Desa-nya untuk pengelolaan atau pengembangan objek wisata.

Desa Bajang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan juga termasuk salah satu desa yang memiliki objek wisata, berbeda dengan desa blumbungan, desa ini termasuk desa yang didukung oleh masyarakat keberadaan objek wisatanya yaitu wisata Bukit Brukoh. Objek wisata Bukit Brukoh dikelola oleh Desa sejak tahun 2019 dengan menggunakan dana desa sebesar Rp. 200.000.000,- dan dana dari swadaya masyarakat. Kepala desa menggunakan wewenangnya untuk memutuskan objek wisata desa tersebut dikelola oleh Desa. Tidak terdapat penolakan dari tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum.

Menurut Dewi dan Aufal:(2022) Industri pariwisata di Madura masih terbelakang karena beberapa alasan termasuk penolakan dari kiai (tokoh agama/guru). Di Madura, kiai merupakan ikon keagamaan dan sosial yang memiliki kekuatan berpengaruh dalam masyarakat Madura karena memiliki filosofi *Buppa' Babbu, Guru, Rato*. Tokoh agama di Madura bukan hanya sekedar pemimpin agama, tetapi juga berperan sebagai pemimpin sosial yang sangat berpengaruh. Mereka sering dijadikan panutan dalam mengambil keputusan oleh masyarakat sekitar. Tokoh agama memiliki kemampuan untuk merubah dan seringkali memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan masyarakat. Keputusan-keputusan penting termasuk yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas sering kali diambil dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada tokoh agama. Kepala Desa tidak akan berani mengambil keputusan sepihak meskipun kepala desa itu mempunyai wewenang tapi bertentangan dengan tokoh agama (kearifan lokal di Madura).

Masyarakat Madura cenderung ramai mengunjungi objek wisata baru hanya pada awal pembukaannya, hal tersebut terjadi karena Pamekasan bukanlah kota wisata dan pengunjungnya adalah masyarakat lokal. Sesuai dengan temuan penelitian Nisa' dkk:(2023)¹⁹ mengemukakan bahwasanya wisatawan yang berkunjung di wisata Pamekasan merupakan *tourist* lokal yang tidak membutuhkan hotel untuk menginap, namun masih membutuhkan warung makan. Antusiasme tersebut biasanya mengalami

¹⁹ Nisa', K., Malia, E., Baihaki, A., & Bachiar, D. mo. (2023). Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 26–35.

penurunan seiring berjalannya waktu. Masyarakat tidak akan kembali berkunjung kecuali objek wisata tersebut memiliki ciri khas yang menonjol seperti pantai slopeng dan pantai lombang yang dikenal karena keindahan alam yang membuatnya tetap diminati. Wisata buatan biasanya akan mengalami penurunan minat wisatawan jika tidak ada pengembangan lebih lanjut.

Di Desa Blumbungan dan desa Bajang tidak ditemukan anggaran yang mendukung pada peningkatan kemandirian desa dengan mengoptimalkan dana desanya untuk pengembangan wisata. Namun, fokus pada pencapaian SDGS yang Nomer 2 (Tanpa kelaparan) dan SDGS Nomer 15 (Ekosistem Daratan) yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan pertanian. Hatersebut dipilih Pemdes karena memang secara geografis dan mayoritas matapencaharian masyarakatnya yaitu sebagai petani.

Fokus utama penganggaran di dua desa tersebut adalah pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, khususnya dalam pekerjaan umum seperti pengaspalan jalan, pembangunan saluran irigasi dan penahan tanah. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Meski tidak disebutkan secara Eksplisit, proyek seperti saluran irigasi dan sumur bor mendukung sektor pertanian. Selain ketahanan pangan dan pertanian, desa juga menganggarkan Pemberdayaan dan Pembinaan untuk UMKM dan kegiatan kepemudaan serta PKK, namun relatif kecil dibandingkan dengan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Penting bagi desa untuk memperhatikan dukungan masyarakat atau tokoh agama setempat dalam program desa, sesuai dengan penelitian Safrilul dan Suryani:(2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting khususnya pengelolaan desa wisata yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena masyarakat lokal merupakan orang pertama yang mengetahui keadaan di daerahnya dibandingkan masyarakat luar desa. (Prihastha dan Suswanta:2020:238) Juga menyatakan bahwa konsep pengembangan pariwisata lokal melalui desa wisata untuk mengembangkan potensi masyarakat tidak akan berjalan baik apabila partisipasi masyarakat belum maksimal. Oleh karena itu perlunya perencanaan yang matang dan pelibatan masyarakat secara langsung juga dalam perencanaan bersama pemerintah dan kelompok pengelola wisata serta harus terus dilakukan peningkatan keahlian masyarakat dalam mengelola wisata.

Wisata di desa akan berkembang jika mendapatkan dukungan dari semua elemen yang meliputi partisipasi masyarakat, partisipasi tokoh agama dan partisipasi pemerintah desa. Di Desa Blumbungan meskipun ada potensi wisata dan Pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk menganggarkan dana desanya untuk pengembangan pariwisata, namun tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun tokoh agama maka pengembangan tersebut tidak akan optimal. Selain itu dalam membangun objek wisata desa juga perlu memperhatikan aspek daya tarik, aksesibilitas, fasilitas dan kelembagaan (Medlik:1980) dalam (Kusuma dan Malia (2020) di Desa Blumbungan keempat faktor tersebut tidak dimiliki secara optimal.

Menurut (Medlik:1980) dalam (Kusuma dan Malia (2020) terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan untuk mengenali potensi disuatu daerah yaitu *Attraction* (Daya tarik), *Accessibility* (Aksesibilitas), *Amenity* (Fasilitas), *Anciliary* (Kelembagaan). Tipologi desa Blumbungan dan Desa Bajang berbeda, secara geografis Desa Blumbungan tidak menyajikan pemandangan sejuk dan suasana desa yang khas seperti di Desa Bajang. Keempat aspek wisata yang perlu dimiliki oleh desa memang tidak mendukung untuk Desa Blumbungan, namun sebaliknya di Desa Bajang meski secara fasilitas dan aksesnya masih belum optimal.

Moralitas kepala desa dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terutama untuk menetapkan desa menjadi desa sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Yang pertama adalah TRansparansi, Kepala desa harus menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa terkait proses penetapan APBDes. Hal ini mencakup anggaran yang direncanakan, sumber pendapatan, dan alokasi belanja [1]. Yang kedua Akuntabilitas, Kepala desa harus bertanggung jawab atas penggunaan dana desa dan melaporkan hasil penggunaan tersebut secara berkala. Ini memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musyawarah desa [2]. Dan yang ketiga yaitu Partisipasi Masyarakat, Kepala desa harus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa (Musdes) sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini mencakup melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat lainnya [3]. Dengan memperhatikan aspek-aspek moralitas ini, kepala desa dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat desa tanpa harus merasa mendapatkan tekanan dari pihak luar.

Selain moralitas, Kondisi psikologis kepala desa dalam menetapkan anggaran objek wisata desa juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti Tanggung Jawab dan Tekanan, Kepala desa sering merasakan tekanan yang besar dalam membuat keputusan anggaran karena mereka harus memastikan dana desa digunakan secara efektif dan transparan. Mereka harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat dan sering kali harus menghadapi tuntutan yang bertentangan. faktor Kapasitas dan Kompetensi, Kemampuan kepala desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran sangat penting. Keterbatasan dalam kompetensi ini bisa menyebabkan stres dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan [1]. Factor Partisipasi Masyarakat, Tingkat partisipasi dan dukungan dari masyarakat dapat mempengaruhi kondisi psikologis kepala desa. Partisipasi yang tinggi dapat memberikan dorongan moral dan mengurangi beban psikologis [2]. Faktor Arah dan Kebijakan Pemerintah, Kepala desa harus selaras dengan visi dan misi yang diusung oleh pemerintah daerah. Adanya kebijakan yang jelas dan dukungan dari pemerintah daerah dapat membantu mengurangi tekanan yang dirasakan [4]. Serta Dukungan Infrastruktur, Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh pemerintah desa dapat membantu dalam perencanaan yang lebih baik dan menurunkan beban psikologis dalam pengelolaan anggaran objek wisata [3].

Penutup

Kepala Desa dalam menganggarkan Dana Desa-nya untuk objek wisata desa tetap melibatkan masyarakat didalamnya, sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 bahwa dalam penyusunan APBDes hendaknya melibatkan masyarakat didalamnya. Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan adanya opini masyarakat terutama para tokoh agama dalam hal ini yaitu para Kiyai yang kontra dengan adanya objek wisata karena dianggap lebih banyak mudharat daripada manfaat. Bagi kepala desa, dukungan para kiyai sangat penting untuk keberlanjutan program desa, karena kiyai merupakan sentral masyarakat, masyarakat akan tunduk terhadap dawuh kiyai. Sementara kepala desa harus memilih program alternatif lainnya untuk menganggarkan dana desanya dalam mendukung *Sustainability Development Goal's*

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis dampak perkembangan pariwisata terhadap perilaku konsumtif masyarakat wilayah bali selatan.* (n.d.).
- Anisykurlillah, I., Wardianti, S., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (n.d.). Analisis Moralitas Individu Dalam Memoderasi Determinan Kecurangan Akuntansi. In *Analisis Moralitas*
- Hasmawati. (2022). PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kab. Mamuju). *JEPA*.
- Kartika, T., Manajemen, P., Sekolah, P., Ilmu, T., Pariwisata, E., & Bandung, Y.-A. (n.d.). *DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP ASPEK EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN FISIK DI DESA PANJALU*.
- Komang Mahayana Putra, I., Wayan Sumetri, N., Wayan Eka Dian Rahmanu, I., Gede Putra Yudistira, C., & Dwi Cahaya Putra, K. (2022). *Tourists Perceptions and Preferences of Sustainable Rural Tourism Management: A Case Study on the Bakas Tourism Area, Banjarangkan Sub District Klungkung Regency, Bali*.
- Kurniawan, J., & Haq, A. (2022). PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, INTEGRITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1691–1702.
<https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14532>
- Mayasari Soeswoyo, D., Swasti Asparini Syahrijati, P., Aryo Baskoro, D., Aryo Anggoro, D., Jayanti Sutisna, M., Tinggi Pariwisata Bogor-Indonesia, S., & Author, C. (2022). Tourism Components Analysis and Sustainable Rural Tourism Development Planning Based on Culture and Agriculture in Indonesia (Case Study: Cimande Village). *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 1(6), 1129–1146.
<https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/index>
- Pramono, I. B., Oktavianti, H., Sutikno, S., & Ambariyanto, A. (2023). Strategi Pengembangan Bukit Brukoh Sebagai Desa Wisata Halal Berbasis Ekologi, Edukasi Dan Komunitas Masyarakat Desa. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3(2).
<https://doi.org/10.21107/bep.v3i2.16362>
- Roalina, D. (2020). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KESESUAIAN KOMPENSASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN MORALITAS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN DANA DESA DENGAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Universitas Negeri Semarang*.
- Romadhona, M. K., Kurniawan, F., Sabrie, H. Y., & Agustin, E. (n.d.). Pengembangan Objek Wisata Potensial “Kampung Tenggher”: Tantangan dan Strategi. In *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat* (Vol. 2). Online.
- Safitri, R. (n.d.). *ANALISIS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Taman Jaya)*.
- Sigiro, E. E., Marjuka, Y., Yudea, R., & Alim, T. E. (2022). IDENTIFYING THE VILLAGE FUND’S EFFECTIVENESS IN STRENGTHENING SUSTAINABLE TOURISM VILLAGES. *Journal of Event, Tourism and Hospitality Studies*, 2, 77–105.
<https://doi.org/10.32890/jeth2022.2.4>
- Sudibya, B. (1970). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22–26.
<https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8>
- Susandini, A., & Islam, D. (2022). Konsep pengembangan wisata garam Madura dengan analisis SWOT. *MBR (Management and Business Review)*, 6(1), 59–68.
<https://doi.org/10.21067/mbr.v6i1.6648>

- Tityanda Putri, C., Wardiyanto, B., & Suaedi, F. (n.d.). *Policy evaluation of village fund through an agro-tourism village for sustainable local development Evaluasi kebijakan dana desa melalui desa wisata agro guna menciptakan pembangunan local berkelanjutan.*
- Try Yatmaja, P., Minang, P., Bahari, R., & Kelawi, D. (n.d.). *EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN.*
- Yosandri, B. J., Eviana, N., Usaha, P., Wisata, P., Pariwisata, A., & Jakarta, I. (n.d.). *Peningkatan Keputusan Berkunjung Wisatawan Melalui Pengembangan Citra Destinasi dan Aksesibilitas di Lembah Tepus Bogor Tambahkan.* 7(1), 2022.
- Yudha, C. K., Yoga, I. G. A. P., & Mandira, I. M. C. (2021). Analisis Pengaruh Faktor Psikologis Wisatawan Pada Keputusan Berkunjung. *EKONIKA Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 6(2), 166. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v6i2.1360>
- Zakariya, R. (n.d.). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>
- [19] <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/desa-wisata-konsep-pariwisata-berkelanjutan-berbasis-pemberdayaan-masyarakat/>